

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen Ketiga.*
- _____. *Undang-undang tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003.*
- _____. *Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU Nomor 15 Tahun 2004.*
- _____. *Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan. UU Nomor 15 Tahun 2006.*
- _____. *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2019.*
- _____. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007.*

B. Buku

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945.* Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Armando, Ade. *Mengenal Lebih Dekat BPK : Sebuah Panduan Populer.* Jakarta: Biro Humas Dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1983.
- Arto, A. Mukti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Demokrasi.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- _____. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945.* Jakarta: FH UII Press, 2003.
- _____. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

- _____. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- _____. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute, 2007.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Indah Populer, 2008.
- _____. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Fathurrahan. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Eckstein, Otto. *Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Manan , Bagir. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Jogjakarta: UII Press, 2004.
- M. Hadjon, Philipus. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu, 1992.
- Manggalatung, H.A.Salman. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi : Gramata Publishing, 2016.
- Marwan, Mas. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Montesquieu. *Jiwa Undang-Undang*. Jakarta: Pustaka Media, 2001.
- P. Soeria Atmadja, Arifin. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia, 1986.

- Rahimullah. *Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sirajuddin. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soediman, Kartohadiprojo. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pembangunan, 1965.
- Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, Bandung, 2011.
- Triwulan, Titik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Thohari, A. Ahsin.. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2006.

C. Lain-lain

- Alrasid, Harun. "Suatu Tinjauan Formal Yuridis", Masalah Pengisian Jabatan Presiden di Indonesia Sejak Sidang Dokuitsu Zyunbi Choosakai 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993". Depok: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1993.
- Attamimi, Hamid. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 1990.
- BPK, RI. Pembahasan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK.
- BPK, RI. <https://web.bpk.go.id/Pages/Dasar-Hukum.aspx>. (10 Maret 2022), 2022.
- BPK, RI. https://www.bpk.go.id/menu/profil_bpk. (11 Maret 2022), 2022.

- Hariansah, Syafri. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/886>. (10 Januari 2022), 2022.
- Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fit-and-proper-test-yang-ideal-hol87>. (10 Januari 2022), 2002.
- Kasim, Muslim. “Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2019.
- Permusyawaratan Rakyat RI. *Naskah Akademik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usulan Komisi Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004. Majelis
- Robuwan, Rahmat . “Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. XII No. 1, 2018.